

PENDIDIKAN POLITIK DALAM DEMOKRATISASI

Political education which is done deliberately and with purpose to give understanding to people about the political position and the rights and obligations as citizens. It is also necessary democratization of the human person, and the democratization of institutions and government bureaucracy, so that all means are not running an authoritarian and arbitrary executions.

Bedjo Sukarno – FISIP Unisri

Key Word : Political education, democratization

Pendahuluan

Belajar politik ini terutama sekali bukan untuk menjadi pengikut satu aliran politik, akan tetapi lebih ditekankan menjadi warganegarayang menyadari benar tugas-tugas dan kewajibannya selaku anggota masyarakat dan selaku warga dari suatu negara. Dengan menyadari kedudukan dan fungsinya selaku insan politik ancasila yang dewasa dan bertanggung jawab secara etis.

Untuk sampai ketinggian kesadaran sedemikian, setiap pribadi harus belajar banyak. Bukan hanya dengan jalan menambah informasi ilmiah dan keahlian tehnik agar bisa mendapatkan nafkah pencahariansaja, akan tetapi terutama sekali banyak belajar di bidang politik, agar supaya menjadi warganegara yang baik dan sadar politik.

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warganegara Indonesi, maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di negara Indonesia ini khas bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri, dan telah disepakati secara nasional demi tegaknya Republik Indonesia. Juga demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa atau rakyat Indonesia.

Dengan pedoman tersebut, diharapkan agar kita semua terutama para pemimpin pandai-pandai menyaring menilai ulang, dan jika perlu juga menolak semua ideologi dan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa kita. Lewat pendidikan politik juga diharapkan agar dengan jiwa persatuan, kesatuan dan saling tergantung yang sangat erat, kita mampu menanggulangi segala ancaman

dan serbuan kekuatan atau pengaruh-pengaruh dari negara luar yang ingin menjajah secara politis, ekonomi dan kultural negara kita. Kemudian bisa tergalang penalaran sehat mengenai bela negara dan nasionalisme yang sehat.

Pendidikan politik untuk membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat, dan pembentukan atau pendidikan diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik, pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan yang dewasa.

Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses individu menjadi intelektual politik yang bersinggasa dalam menara gading keilmuan atau menjadi pribadi kritis dan cerdas dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain atau dengan masyarakatnya di tengah medan sosial dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek sosial ekonomi dan budaya di tengah-tengah situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan. Atau oleh adanya kemajemukan masyarakatnya.

Semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia, bahwa politik hadir dimana-mana termasuk di sekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat, hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang. Pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting sebab politik mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia.

Politik berarti mengatur apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan, oleh karena itu maksud tersebut menyadarkan kita akan pentingnya mempelajari politik.

Manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakekat manusia untuk hidup dalam kependudukan, hanya dalam kependudukan itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi krena urusan-urusan yang berkenaan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, untuk mewujudkan tindakan-tindakan kebaikan bersama yang akan diambil.

Di alam demokrasi sekarang, pendidikan politik diperlukan karena tuntutan-tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi memunculkan banyak ketidakstabilan, namun juga memberikan kemungkinan-kemungkinan baru serta harapan baru yang menyenangkan. Pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan perubahan sikap-sikap politik perorangan saja, akan tetapi juga untuk mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui dan mendinamisir institusi-institusi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga politiknya.

Dengan sengaja bangsa kita memilih bentuk demokrasi sebagai wujud pemerintahan dan sebagai asas dasar bagi penataan pemerintahan, karena demokrasi diharapkan memberikan jaminan berupa kebebasan manusia untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri. Demokrasi tidak hanya melindungi kebebasan pribadi warganegara melalui UUD, undang-undang dan hukum-hukum formalnya saja, akan tetapi juga menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang menyangkut dimensi publik dan tanggungjawab etisnya.

Dalam demokrasi itu dijamin aspek-aspek privat dan aspek publik dari setiap warganegara, untuk sampai pada pengertian mengenai hal-hal tersebut, diperlukan pendidikan politik bagi warganegara. Di masa mendatang, yang perlu ditingkatkan dalam masyarakat kita adalah pengetahuan dan kesadaran politiknya, karena pendidikan politik dewasa ini yang sedang dianjurkan sebetulnya belum dilaksanakan.

Melihat pendidikan politik ini perlu sekali untuk memperetebal rasa cinta tanah air dan melihat tanah airnya sebagai sesuatu yang paling mulia. Janganlah sempat berpikir bahwa pembangunan itu cukup hanya dengan mengisi perut dengan roti, tetapi pembangunan adalah untuk membangun manusia seutuhnya, material maupun spiritual sampai ke masyarakat di desa-desa. (

Kesadaran berpolitik ini jangan hanya berkembang di kota-kota besar, karena kebetulan tehnokrat berada di kota. Bila ini terjadi kita akan mengalami ketimpangan dalam kesadaran politik, ketimpangan ini dikawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial, seperti di jaman revolusi Meksiko di mana desa memberontak terhadap kota hanya karena kota dirasakan selalu mengatur kehidupan di desa tanpa menghayatinya. (B.M. Diah, 1984-52)

Pengertian politik

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik.

1. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Seperti yang dikemukakan Aristoteles dalam bukunya Ramlan Surbakti (1992-2) pandangan klasik melihat politik sebagai suatu asosiasi warganegara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Aktivitas yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada aktivitas urusan yang menyangkut kepentingan swasta.
2. Politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Dalam pengertian politik terkandung tujuan dan etik masyarakat yang jelas. Berpolitik ialah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama.

Sebelum merumuskan konsep politik, terdapat beberapa hal anggapan yang lebih mendasarinya diantaranya, terjadi dalam setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi. Di dalam kelompok yang dominan di masyarakat ikut serta dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal itu pemerintah mengalokasikan sumber-sumber yang langka pada beberapa kelompok dan individu, tetapi tidak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok dan individu yang lain.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah menguntungkan semua pihak.

Perkembangan dari kebijakan pemerintah tersebut yang tidak obyektif, berakibat ada tekanan-tekanan berupa petisi, demonstrasi, protes, huru-hara dan perdebatan dalam proses pemilihan umum yang berasal dari golongan yang tidak puas terhadap pola distribusi sumber yang ada merupakan gejala umum dalam masyarakat.

Meluasnya tekanan-tekanan maka kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari pola distribusi sumber yang ada berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan.

Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum bahwa sistem politik yang ada memiliki keabsahan maka makin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan. Pada setiap masyarakat, penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya yang istimewa, upaya itu dilakukan dengan mencari pembenaran-pembenaran dalam bentuk ideologi, ajaran agama, dan formula-formula politik lainnya. Maksudnya, penguasa acap kali melakukan pembohongan atau setengah benar, setengah bohong untuk meyakinkan masyarakat.

Politik tetap merupakan *the art of the possible* banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang semu sebab sulit dilaksanakan dalam kenyataan. Dalam dunia nyata, ada pelbagai kendala yang berupa watak manusia, kekuasaan, pranata-pranata sosial, kelangkaan teknologi, dan faktor tak terduga yang lain yang membatasi apa yang secara aktual dapat dilakukan.

Dalam politik tidak ada yang serba gratis, maksudnya setiap aksi yang dilakukan selalu ada ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti ditanggung. Sama halnya manusia yang sukar mengharapkan tercapainya semua nilai dan tujuan yang ditetapkan karena tujuan yang satu akan merugikan pada sisi yang lain.

Tuntutan perluasan demokrasi berupa kontrol masyarakat yang semakin besar atas penyelenggaraan pemerintahan mungkin akan mengurangi efektivitas pemerintahan. Sementara itu, pemerintahan yang semakin efektif, mungkin

menghendaki pertanggungjawaban pemerintah yang terbatas pada masyarakat umum. Konflik untuk mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber yang langka menjadi konflik antar manusia sebagai individu maupun kelompok. Manusia yang menjadi subyek politik, yang menggunakan lembaga-lembaga politik formal untuk memanipulasikan dan mengendalikan masyarakat, dan manusia pula yang menjadi obyek politik yang dikendalikan penguasa dan menjadi ancaman atas kekuasaan penguasa.

David Easton melihat kehidupan politik sebagai satu sistem tingkah laku yang beroperasi di dalam dan mereaksi terhadap lingkungan sosialnya, seraya menyajikan alokasi nilai-nilai yang mengikat (Kartini Kartono, 1996=5). Dalam sistem politik unsur paling penting ialah pembagian nilai-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi setiap warganegara dan untuk semua masyarakat. Dengan begitu politik erat menyangkut pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan adil.

Oleh K.W Deuttsch mengenai politik (Kartini Kartono, 1996-7) mengatakan politik dan pemerintah itu pada esensinya tampil sebagai proses-proses pengendalian dan pengordinasian usaha-usaha insani dalam mencapai beberapa perangkat tujuan. Satu kelompok akan muncul apabila berlangsung relasi-relasi yang berulang-ulang atau terus-menerus diantara individu dengan individu lain, kemudahan diorganisir cukup baik untuk mendorong terjadinya aktivitas-aktivitas yang bertujuan, khususnya tujuan-tujuan politik.

Aktivitasnya berupa komunikasi akrab saling mempengaruhi, saling ketergantungan di antara para anggota kelompok, dan macam-macam interaksi dalam satu kesatuan sistem sosial yang mengejar kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu dinamika sosial itu merupakan ekspresi dari interrelasi individu dengan individu lain, ditambah pemenuhan kebutuhan serta nilai-nilai pada tingkat manusiawi.

Selanjutnya, aktivitas manusia itu hampir selalu diarahkan pada satu kepentingan atau tujuan, kemudian terjalin interaksi antara kelompok dengan kelompok lain yang diatur dalam satu sistem sosial atau suatu masyarakat yang mengejar kepentingan bersama.

Masyarakat atau kumpulan orang itu merupakan satu alam semesta tunggal yang terdiri dari kelompok-kelompok yang bergabung, pecah berantakan, berserikat dan membentuk koalisi-koalisi serta susunan-susunan kekuatan dalam arus perubahan tanpa henti-hentinya.

Terbentuknya macam-macam perubahan sosial, disebabkan oleh munculnya kelompok-kelompok sosial baru yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu lewat jalur politik. Pluralisme di tengah masyarakat manusia dengan macam-macam bentuk, pengorganisasian, tujuan atau kepentingan, dan fungsinya menyebabkan setiap kelompok mendapatkan kesempatan yang sama besarnya untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing guna mendapatkan kekuasaan politik.

Nilai-nilai penting dalam politik antara lain ialah keamanan, kebebasan, kesejahteraan, keadilan, kesamaan kesempatan untuk berkembang, dan kebersamaan. Maka keadilan dan kesejahteraan itu dalam kehidupan sehari-hari merupakan barang-barang langka yang tidak bisa diperoleh secara otomatis, dan tidak bisa dibeli di pasaran bebas. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut diperlukan lebih banyak politik.

Dilihat dari struktur dan kelembagaannya, politik dapat diartikan sebagai berikut ;

1. Segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan seperti peraturan, tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan dan kekuasaan serta lain-lainnya.
2. Pengaturan dan penguasaan oleh pemerintah atau negara.
3. Cara memrintah suatu teritorium tertentu.
4. Organisasi, pengaturan, taktik strategi, tindakan negara/pemerintah dalam mengendalikan negara dan wilayahnya secara yuridis dan konstitusional.
5. Ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan.

Pengertian politik terbagi dari beberapa kategori antara lain :

- Secara institusional dan hukum kenegaraan, bahwa ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan tentang negaradengan struktur-struktur bagiannya seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, birokrasi dan lembaga penagdilan.

- Menekankan kegiatan memerintah suatu teritorium : Suatu perkumpulan yang bersifat politik, jika kekuasaan dan pengaturannya berlangsung berkesinambungan dalam satu kesatuan teritorial tertentu, dengan menggunakan kekuasaan fisik dan ancaman-ancaman melalui satu bentuk pemerintahan administratif.

Maka sentral dalam politik yaitu dimensi pengaturan yang kokoh dengan menggunakan hukum, kekerasan dan paksaan dalam satu teritorium. Semua aktivitas tersebut di atas merupakan hak utama dari negara / pemerintah demi menjamin tegaknya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, pada hakekatnya politik justru berkaitan dengan aktivitas dinamis manusia untuk memberi bentuk-bentuk baru, mengubah dan merangsang kemajuan setiap manusia di tengah masyarakat.

Dengan demikian politik sifatnya sangat dinamis dan kreatif, dengan dimensi pokok berupa perubahan-perubahan secara berkesinambungan.

- Disamping hal paparan tersebut di atas, ada penguasa-penguasa dan kepala pemerintahan yang tidak habis-habisnya haus kekuasaan, ingin terus berkuasa sampai akhir hidupnya, dan berusaha mempertahankan status quo. Peristiwa macam beginilah, sering membakar emosi kejengkelan rakyat, ketidakpuasan kumulatif dan pemberontakan.
- Politik sebagai pola-pola menetap dari relasi manusia yang berkepentingan dengan masalah kekuasaan, hukum, dan kewibawaan pemerintah. Maka aktivitas individu dan kelompok dari struktur keluarga sampai organisasi nasional dan internasional harus menyibukan diri dengan perbuatan ketetapan-ketetapan kolektif untuk mengatur masyarakat dan negara demi pencapaian keadilan dan kesejahteraan bersama.
- Politik menitik beratkan masalah pembagian nilai-nilai yang menyangkut relasi manusia yang diinginkan oleh segenap manusia. Melalui tiga fase yaitu pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam kesatuan analisa yang menjadi isi dan inti satu kekuasaan, penentuan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terakhir adalah tujuan politik.

Demokratisasi

Sekarang di dunia ini terdapat dua sistem sosial yang sama sekali berbeda, kedua-duanya menyebut dirinya sebagai **demokratis**. Masing-masing memiliki jutaan pengikut yang mengklaim bahwa sistemnyalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dari mereka masing-masing memberikan janji, memberikan harapan, juga memiliki kemampuan merebut perhatian pada setiap manusia dalam kehidupannya yang tidak membawa apapun selain rasa gundah, prihatin ataupun khawatir.

Masyarakat menciptakan demokrasi, demokrasi merupakan hasil dari rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Di banyak negara, sudah lama sekali orang tahu tentang demokrasi, mereka mengetahuinya dengan mencoba kemungkinan untuk bisa berkumpul di sebuah kampung dan menyetujui sebuah kesepakatan bersama.

Untuk memahami hakekat demokrasi kita harus mengujinya sebagaimana ia tampil di beberapa belahan dunia. Demokrasi tampak pada masyarakat yang menciptakannya dan pada prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang, karena demokrasi merupakan produk langsung dari seluruh warganya. Tidak ada satupun masyarakat demokrasi yang mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-citanya menjadi kenyataan. Warga demokrasi adalah umat manusia, dengan segala kebaikan maupun keburukannya.

Demokrasi menyerap pemikiran dan perilaku seluruh lapisan rakyat. Sebagian membahayakan, sebagian lagi bermanfaat, dan terkadang menyakitkan, dari pengalaman itulah orang belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang pada gilirannya menjadi masyarakat yang kaya dan penuh makna.

Seringkali orang kehilangan prinsip, baik secara individual maupun kelompok. Akan tetapi tatkala ide-ide utama dikuatkan oleh hukum dan ajaran dari para pemimpin mereka, maka mereka secara individu berbalik kembali pada keyakinan yang terbukti penting bagi kebahagiaan serta kebaikan bersama.

Demokrasi adalah sesuatu yang penting bagi institusi pemerintah, dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang bebas. Kriteria yang membedakan gagasan demokrasi adalah sikap terhadap manusia. Sikap dasar ini yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln sebagai berikut : Karena aku tidak ingin menjadi budak dan

aku tidak ingin menjadi tuan. Demikianlah demokrasi menurutnya, apapun yang berbeda dari gagasan itu sampai pada tingkat yang ekstrem, bukanlah demokrasi. (Richard M. Ketchum, 2004-20)

Tatanan demokrasi tidak akan terbangun tanpa hadirnya jaminan terhadap penegakan hak azasi manusia, sebaliknya penegakan hak azasi manusia hanya bisa terjamin dalam keberlangsungan tatanan demokrasi.

Ketika hak-hak dasar kemanusiaan tidak mendapatkan perlindungan oleh negara yang menganut sistem demokrasi, pada saat itulah pertanda rapuhnya pilar-pilar demokrasi. Dalam konteks inilah keabsahan dan substansi tegaknya suatu tatanan demokrasi berdiri di atas perlindungan, kebebasan setiap warga negara untuk menggunakan hak-hak sipil dan politiknya yang dijamin konstitusi.

Satu hal yang meresahkan tengah terjadi, warga negara semakin terasing dari pengalaman konkrit kehidupan berdemokrasi. Tidak hanya dalam konteks memperjuangkan artikulasi politik dan membangun representasi dengan wakil rakyat dan pemerintahan, lebih mendasar dari itu warga negara semakin terasing dari pengalaman demokrasi untuk menggunakan hak-hak sipil dan politiknya.

Seperti ditegaskan oleh Damien Kingsbury dalam *Political Development* (Airlangga Pribadi, 2010), relasi antara pembangunan politik demokrasi dan penegakan hak azasi manusia di suatu negara adalah basis dari keberlangsungan sistem demokrasi. Pada tingkat dasar, jaminan dan respek negara terhadap hak-hak sipil dan politik dari setiap warganegara memperlihatkan bahwa masyarakat politik (eksekutif, legislatif dan partai politik) menghormati warganegara sebagai anggota yang tak ternilai dari bangunan masyarakat politik yang bebas berpartisipasi dan tidak boleh dihalangi dalam politik bernegara.

Melalui pendidikan politik diharapkan terjadinya perubahan sikap rakyat dari sinisme politik, kepasifan dan apatisisme politik bisa beralih menjadi sikap aktif partisipatif, kegairahan berpolitik, berinisiatif, proaktif, inovatif dan demokratis, hal tersebut sangat diperlukan. Sebab setiap warga negara harus ikut membangun masyarakat dan negara, bahkan wajib diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membangun diri sendiri dan membangun masyarakat lingkungannya untuk bisa maju dan berkesejahteraan.

Semua usaha pembangunan dalam suatu negara itu hanya bisa berhasil dengan bantuan partisipasi rakyat, dimaksudkan rakyat supaya didorong untuk ikut merevisi dan merenovasi institusi kemasyarakatan dan pelebagaan politik. Antara lain untuk mencegah tehnokrasi otoriter dan mencegah overbirokratisasi yang sering memacetkan pembangunan, memberantas korupsi yang merajalela.

Proses demokratisasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan struktur masyarakat, dengan prinsip realistik dan lebih manusiawi berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunitas politik yang modern. Sedangkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan azas tatanan kenegaraan menjamin kebebasan individu, akan tetapi juga menagih pertanggungjawaban etis setiap orang dalam melaksanakan fungsi sosial dan fungsi publiknya. Dengan demikian rakyat itu membantu melaksanakan proses demokratisasi yang lebih lanjut dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

Tak bisa tidak pertumbuhan negara demokrasi yang semakin maju itu akan menyebabkan keterlilitan antara kekuasaan pemerintah dengan aspirasi rakyat yang semakin akrab, untuk bersama-sama membangun negara dan bangsa. Maka politik pada hakekatnya merupakan penggunaan kekuasaan yang menyangkut mati hidupnya segenap lapisan rakyat dan masyarakat tanpa kecuali. Oleh karena itu rakyat berhak pula untuk mengawasi operasionalisasi kekuasaan pemerintah agar berjalan lurus, bersih, adil dan benar.

Demokrasi juga membawa konsekwensi lebih jauh lagi yaitu demokratisasi pribadi serta demokratisasi struktur kemasyarakatan dan struktur politik. Sehubungan dengan hal ini sumbangan pendidikan politik pada demokratisasi, prosesperubahan dan pembangunan itu dilakukan atas azas-azas sebagai berikut :

1. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dan lembaga kenegaraan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab.
2. Demokrasi tidak hanya menjamin hak-hak azasi manusia dan kebebasan kehidupan pribadi saja, tetapi juga menjamin dimensi publiknya yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban moril terhadap sesama manusia dan masyarakat, serta terhadap negara. Jadi baik aspek privat maupun aspek publik dapat diungkapkan secara bebas.

3. Demokrasi tidak secara otomatis dapat menciptakan masyarakat harmonis tanpa konflik, karena itu harus diperjuangkan dan ditingkatkan. Demokrasi justru memungkinkan timbulnya banyak perbedaan, konflik dan masyarakat majemuk yang dinamis sifatnya, dengan banyak perubahan serba cepat. Namun semua itu sudah diperhitungkan, bisa ditanggulangi dan harus bisa dikendalikan. Karena itu diperlukan manajemen politik yang baik.

Demokrasi bertujuan membuat kehidupan bersama di masa mendatang menjadi lebih baik dengan jalan menerapkan prinsip-prinsip demokratis di semua sektor kehidupan. Selanjutnya, pilihan bangsa kita pada bentuk pemerintahan demokratis sebagai azas dasar bagi kenegaraan, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk mengaktualkan segenap potensi dan bakatnya, untuk menjadi manusia utuh yang menyadari dirinya.

Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi sosial politik di tengah lingkungannya sendiri, serta masyarakat nasional sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang.

Pendidikan Politik

Dilaksanakannya pendidikan politik harus berisikan ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat, mengarah ke tingkat demokrasi sejati. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Diawali dengan mawas segala kekurangan, kelemahan, dan kekurangan-kekurangan di masa lampau, kemudian mengoreksinya dengan cara-cara baru yang sesuai dan mengarah pada inovasi. Dengan melalui pendidikan politik ini diharapkan bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat dan bangsa.

Pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematisasikan aktivitas sosial dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. Yang berupa pengembangan sportivitas, berperilaku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri.

Identik dengan pembentukan hati nurani politik, di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab terhadap sesama warganegara. Dalam iklim demokrasi rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri alternatif yang menguntungkan bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dengan mendapatkan pendidikan politik, massa rakyat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis. Dapat menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai fenomena politik dengan segala jaringannya. Dengan begitu orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, verifikasi (pembuktian) terhadap realitas politik yang tengah berlangsung.

Sebab fakta politik dengan segenap kaitannya itu bukan merupakan kepastian yang menetap dan massif tidak bisa berubah, akan tetapi merupakan gejala menjadi yang dinamis dan dengan sengaja diubah untuk dibetulkan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan politik dan kemasyarakatan menganalisis dan membahas konflik-konflik aktual dengan kemampuan yang dimiliki rakyat sendiri. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk mengatur masyarakat, negara dan pemerintahan.

Dengan pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan azas-azas demokrasi sejati. Politik itu bukan monopoli para pemimpin, kaum berduit atau kelompok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama bagi setiap warganegara. (Kartini Kartono,1996-57)

Tujuan pendidikan politik yaitu menampilkan peranan setiap individu selaku warganegara dengan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin. Begitu juga agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara. Sebab pendidikan politik itu akan menjadi perbuatan berenang di daratan kalau tidak disertai aksi perbuatan. Sebaliknya aksi politik akan menjadi aktivisme atau aksi gila jika tidak disertai refleksi dan wawasan mendalam mengenai perbuatan pendidikan politik.

Maka dari itu, belajar politik itu secara implisit mengandung aksi politik yaitu berupa partisipasi politik, menanggulangi secara konkrit atau melaksanakan secara nyata dalam proses politik. Maksud dan tujuannya membawakan perubahan dan perbaikan dalam struktur-struktur politik, sehubungan dengan hal ini situasi belajar politik itu memerlukan dimensi distansi (jarak) dalam ruang dan waktu agar orang bisa berfikir obyektif dan jernih. Karena itu distansi psikologis itu merupakan salah satu persyaratan dalam proses belajar politik agar orang bisa.

Belajar itu mensyaratkan adanya analisa kritis dan rasional, disertai sifat keterbukaan. Karena itu dalam proses belajar orang harus terus-menerus bertanya dan bertanya lagi, belajar menjawab dan mempertimbangkan saran-saran eksternal. Kemudian disusul dengan melakukan perbuatan nyata yaitu melakukan aksi politik. Jelasnya, hubungan antara belajar politik dengan aksi politik itu bukan kontradiksi, akan tetapi merupakan urutan sambung menyambung dari aksi dan refleksi, pada hakekatnya merupakan tujuan dari pendidikan politik.

Apabila setiap individu dari warganegara telah mendapatkan pendidikan politik sebenarnya orang mendambakan kekuatan intelektual dan fisik untuk ikut menguasai kondisi sosial politik, bahkan juga ikut memberikan tekanan. Selanjutnya berdasarkan hak-hak azasi manusia dalam pendidikan politik itu terdapat dimensi keterbukaan yang prinsipil menuju ke masa yang akan datang yang lebih baik lagi. Sebab inti kemanusiaan itu bukan terletak pada apa diri seseorang sekarang ini, akan tetapi dirinya seperti yang diharapkan dan akan sungguh-sungguh direalisasikan di masa mendatang.

Dalam kegiatan belajar politik dan berpolitik itu mau tidak mau orang akan selalu memilih satu pihak atau satu partai, karena orang tidak puas terhadap macam-macam status quo, kepincangan dan ketidakadilan. Maka dia akan berpihak pada struktur-struktur yang menyebabkan timbulnya kepincangan dan ketidakadilan atau memihak kepada kelompok orang-orang yang menuntut dihapuskannya kepincangan dan ketidakadilan. Pada umumnya orang akan berusaha mengarahkan dirinya ke depan yang berbeda dan yang lebih baik, jadi ada gerakan emansipasi dan usaha untuk maju. Partisipasi politik rakyat, keterpihakan dalam konflik umum atau terbuka, dan keikutsertaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum.

Arah pendidikan politik yaitu menuju ke arah transparansi atau keterbukaan dan kebebasan. Orang tidak ingin menunjukkan jalan kepada pribadi lain, akan tetapi membantu orang lain tadi menemukan dan melewati jalannya sendiri dan visi kemasyarakatan yang terbuka. Pandangan hidup terbuka itu menonjolkan kebebasan manusia untuk merealisasikan diri sendiri, dikaitkan dengan relasi personalnya dengan masyarakat sekitar. Karena itu individualisme, demokratisasi, kebebasan personal dan orde sosial yang maju itu saling bertalian tidak bisa dipisah-pisahkan.

Keempat hal tersebut ada segaris dengan gerakan-gerakan emansipasi di bidang demokratisasi politik, demokratisasi sosial, ekonomis dan kultural. Semua aktivitas itu diramalkan dengan kritik kemasyarakatan dan gerakan konkrit. Maka jika aktivitas-aktivitas tersebut di atas dicekal atau dilarang, pasti pendidikan politik akan menjadi pendidikan politik yang semu, pada hakekatnya adalah identik dengan omong kosong besar dan dusta akbar. (Kartini Kartono, 1996-169)

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, pendidikan politik menyatakan bahwa untuk menentukan apakah masyarakat itu bisa betul-betul maju dan berkembang atau justru tidak bisa berkembang. Masyarakat bisa menjadi wujud bagi diri sendiri yang bebas dan otonom yang mempunyai kemampuan dan wewenang untuk ikut menentukan macam-macam ketetapan sosial, politik dan kultural. Juga berpartisipasi konstruktif dalam pengembangan masyarakat dan lembaga-lembaga politik.

Maka rakyat itu supaya dibimbing agar menjadi majikan yang bebas otonom, dan mampu berkarya dan menjadi produktif, realitas ini supaya dijadikan tema sentral dalam pembangunan. Jangan rakyat dijadikan insan berdimensi satu yang hanya bisa mengkonsumsi terus-menerus tanpa boleh memproduksi sendiri.

Dengan bijaksana usaha pembangunan nasional itu harus memperhitungkan dimensi manusia dalam situasinya dengan segenap kebutuhannya. Di samping menghargai pandangan hidup dan tradisi mereka juga harus menanggapi harapan, aspirasi, kesangsian, kebingungan mereka. Karena banyaknya serbuan kekuatan-kekuatan eksternal yang sifatnya menekan dan mengharuskan. Sebagai azasi yang harus dihormati dan ikut diperhitungkan dalam kegiatan membangun daerah, tidak hanya mengkalkulasikan unsur investasi kapital dan unsur keuntungan finansial saja.

Dalam pendidikan politik substansinya juga menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat di daerah di tanah air kita ini pada intinya merupakan masyarakat refleksi yang sangat didominasi oleh keputusan dan ketentuan eksternal. Semua kekuatan luar tadi memutuskan hampir semua kekuatan, norma, dan aturan main. Oleh karena itu memang ada kemajuan dan modernisasi di banyak tempat, namun proses modernisasi dan kemajuannya tidak atau kurang sekali disertai perkembangan autentik khas masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan oleh proses konfirmasi pasif dan imitasi total, karena berlangsung di bawah paksaan dan tekanan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan keswasembadaan daerah-daerah.

Pendidikan politik berkewajiban menerangkan bahwa rakyat tidak boleh dijadikan obyek pembangunan atau obyek yang setiap saat bisa dimanipulasikan oleh para pemimpin. Demikian juga tidak boleh dijadikan bahan rekayasa oleh para pemimpin dan pejabat-pejabat yang berkuasa. Rakyat itu adalah subyek bebas yang otonom, bermartabat, punya hak kebebasan dan kemauan bebas, serta ikut memiliki negara, punya potensi untuk menjadi titah Illahi dengan misi hidup yang berharga, yang harus dihormati sebagaimana mestinya oleh sesama manusia

Oleh sebab itu rakyat tidak boleh dimanipulir selaku obyek, atau dijadikan obyek pembangunan atau obyek politik. Obyek pembangunan adalah situasi kondisi dan lokasi pembangunan dengan segala persyaratan teknis dan ekologisnya, yang bisa dimanipulasikan, diubah, diganti dan dikondisikan. Bukan rakyat selaku subyek bebas dan bermartabat insani itu yang direkayasa.

Rakyat bukan milik para pemimpin politik dan para pejabat negara, juga bukan obyek pembangunan yang harus selalu dikalahkan, serta berkewajiban secara total manut tunduk. Memang dalam kondisi tertindas dan tertekan rakyat bisa hidup dan bisa berkembang, akan tetapi perkembangan mereka itu jelas tidak selaras dengan eksistensi dirinya yang autentik. Jelasnya, menurut kodrat dan ketentuan alam sekitar, rakyat harus terus menerus berjuang, membangun, bekerja dan maju berkembang melakukan proses aktualisasi diri. (Kartini Kartono, 1996-172)

Sebab tidak berkembangnya kemampuan insani rakyat merupakan kerugian material dan spiritual bagi individu yang bersangkutan di samping memiskinkan masyarakat dan negara.

Di mata para penguasa otoriter dari setiap jaman, berpikir benar berarti tidak boleh berpikirnya rakyat, sebab semua kebijakan politik dan perencanaan pembangunan, baik yang di pusat pemerintahan maupun di daerah, sudah dipikirkan dan diputuskan pelaksanaannya oleh para pemimpin dan pakar yang ada di pusat pemerintahan. Maka pikiran, pertimbangan dan harapan rakyat cuma akan memperlambat proses pembangunan. Inilah bentuk penindasan psikis di masa modern sekarang yang tidak sesuai dengan aspirasi demokrasi.

Rakyat dengan pikiran, harapan dan aspirasinya itu merupakan basis konstitusional bagi semua kegiatan pembangunan sejati. Kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan para pemimpin, pejabat penguasa dan pedagang-pedagang kaya saja, akan tetapi harus merata pada setiap warga masyarakat Indonesia, hal ini merupakan tuntutan hati nurani rakyat dan tuntutan demokrasi.

Kemampuan harus diberikan oleh pemerintah kepada rakyat untuk aktualisasi diri yaitu mengembangkan secara optimal semua potensi dan bakatnya sebagai subyek otonom yang menyadari benar kebutuhan pokok lokal, proyek yang perlu dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Mereka supaya diperbolehkan memilih alternatif pembangunan yang paling menguntungkan rakyat setempat, dan tidak memprioritaskan proyek-proyek yang berorientasikan ekspor, pencarian profit sebesar-besarnya bagi kelompok orang kaya baru.

Juga tidak mendahulukan pembangunan kompleks-kompleks industri mega raksasa hasil investasi modal-modal asing yang cuma akan memperkaya negara penanam modal tadi, di mana rakyat kita cuma dijadikan pekerja kuli yang dibayar sangat murah.

Penutup

Agar rakyat itu benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara, dan bisa berperan serta secara politik, rakyat memerlukan pendidikan politik yang sangat diperlukan untuk legalitas perjuangan politik dalam meraih tujuan sosial ekonomi dan tujuan-tujuan politik tertentu. Selanjutnya perjuangan politik selalu berlangsung dalam situasi bertemunya macam-macam kekuatan sosial politik, dengan struktur organisasi, cara kerja dan tujuan politik masing-masing.

Namun perlu dipahami bahwa semua peristiwa politik itu selalu merupakan hal-hal yang belum tuntas. Oleh karena itu belajar politik dan kegiatan politik merupakan aktivitas yang mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dan mempersiapkan tindakan kolektif lewat perjuangan politik dengan menggunakan kekuatan-kekuatan politik.

Di samping itu, pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai bentuk pendidikan intensional dan sistematis untuk mempengaruhi individu, agar lebih efektif lagi dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik, dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam setiap kegiatan politiknya. Maka yang diperlukan bukan hanya melancarkan proses-proses politik saja, akan tetapi justru ada kegiatan politik warganegara dan pertanggungjawab politiknya untuk ikut mengatur masyarakat dan negara atau pemerintahan, menuju kehidupan sejahtera.

Sebab partisipasi aktif itu mempunyai pengaruh dan kekuatan, rakyat bisa ikut dalam pengawasan terhadap perbuatan mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses politik lewat pendidikan politik dan belajar berpolitik.

Demokrasi bukan merupakan situasi yang sudah selesai begitu saja, tetapi merupakan proses yang terus menerus berlanjut dan digarap tanpa henti-hentinya menuju ke arah kemajuan dan kebaikan. Oleh karena itu diperlukan pula demokratisasi pribadi manusianya dan demokratisasi lembaga-lembaga birokrasi dan aparat pemerintah agar tidak melaksanakan kebijakannya otoriter dan sewenang-wenang.

Dengan demikian, demokrasi juga mengandung usaha memperbesar kekuasaan opini publik dan partisipasi politik rakyat. Serta ikut melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan menuju ke pencapaian pemerintahan yang bersih.

Daftar Pustaka

- BM. Diah, 1984, Diperlukan Pendidikan Politik Nyata, Prisma, LP3ES, Yogyakarta
- Malvin J. Vrofsky, 2001, Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, A. Constitutional of the United State, AS
- Padmo Wahyono, 1995, Pengantar Ilmu Politik, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Richard M. Ketchum, 2004, Demokrasi Sebuah Pengantar, Futuh Printika, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, Pendidikan Politik, Mandar Maju, Bandung